

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, A., Fauziah, S. N., Rahmaniar, A., & Irawan, P. R. (2023). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 521-528.
- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik . *Jurnal Akutansi Unesa*, 1-20.
- Alfina, S. (2022). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14(1), 22–30.
- Ashari, P. W. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Pemerintah Daerah Kota Palu Selama Tahun 2018-2023. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3545-3556.
- Astuti, W. (2016). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *Forum Ekonomi*, 43-55.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Damayanti, A., & Wibowo, M. R. (2023). Analisis Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai. *Jurnal Mirai Management*, 8(2).
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. In Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Vol.4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1150>
- Early dan Suandy. (2015). *Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, Dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.

- Fazhillah, A., & Nurlaila, N. (2024). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Kotarih. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 22-35.
- Halimi, S. S. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 215–227.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2022). *Perpajakan: Teori dan praktik* (Edisi ke-1). Rajawali Pers. hlm. 275.
- Indriani, R. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 45–54.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Labolo, M. (2021). *Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Banda Aceh, Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, C.v Andi Offset.
- Mulya, C. (2017). *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ngantung, Nancy Maria. (2016). Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tumohon, *Jurnal EMBA*, 4 (3),032-043.
- Ningrum, D. F., & Siregar, R. A. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(5), 700-708.
- Nurmalasari, Rany. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Proses Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Mataram) *Jur Vol 2*, No 2
- Pali, E. R., Budiarso, N. S., & Walandouw, S. K. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) di Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 983-992.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rahmayanti, R. (2021). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, 12(1), 12–19.

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Buku 1 edisi 8), Jakarta, Salemba Empat.

Selfiani, S., Kadir, H. A., & Yusuf, D. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 228-238.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiarti, L. A. (2021). Analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya periode tahun 2016–2018. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 5(8), 502–514.

Suhendra, R. (2021). *Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(2), 132–143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Wulandari, P. A. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Sardonoharjo: DEEPUBLISH.

Yustika, A. E. (2012). *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.